

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Desa Wisata

1. Pengertian Desa Wisata

UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan desa wisata merupakan suatu daerah tujuan wisata atau disebut pula destinasi pariwisata yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.¹ Totok Mardikanto mendefinisikan desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang memancarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkan pada berbagai komponen kepariwisataan.²

Secara garis besar desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang dapat dimanfaatkan kemampuan unsur-unsur yang memiliki atribut produk wisata secara terpadu, dimana desa tersebut menawarkan secara keseluruhan suasana yang memiliki tema dengan mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari tatanan segi kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan

¹Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pasal 1.

²Totok Mardikanto, *Buku Pedoman Rintisan Model Desa Berdikari Profinsi Jawa Tengah Tahun 2015* (Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2014), 12.

adat keseharian yang memiliki ciri khas arsitektur serta tata ruang desa menjadi suatu rangkaian aktifitas pariwisata.

Pengembangan desa wisata biasanya karena desa tersebut mempunyai ciri khas, daya tarik yang mampu dikomersilkan. Daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Dengan berbagai daya tarik yang dimiliki oleh suatu daerah maka secara tidak langsung sebagai wadah untuk melestarikan seni dan budaya yang ada dalam masyarakat tersebut sekaligus pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang edukatif dan kreatif.

Dengan demikian perlu adanya strategi yang digunakan dalam pengembangan desa wisata agar dapat menarik para wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Strategi dalam program desa wisata tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengintegrasikan potensi dan atraksi wisata di desa wisata.
- b. Meningkatkan manajemen pengelolaan atraksi wisata/ budaya peninggalan sejarah di lingkup desa wisata dan keterpaduan pengembangan dengan potensi pendukung budaya pedesaan.
- c. Memperkenalkan desa dengan keunikan produk-produk seni dan budayanya.

- d. Mengembangkan sadar wisata untuk mendorong tanggungjawab dan peran serta masyarakat dan industri dalam usaha pariwisata.³

Dalam tingkat perkembangannya, desa wisata dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu :

- a. Desa wisata embrio merupakan desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata dan sudah mulai ada gerakan masyarakat/desa untuk mengelolanya menjadi desa wisata
- b. Desa wisata berkembang yaitu desa wisata embrio yang sudah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, sudah dalam swadaya masyarakat/desa untuk pengelolaannya, sudah mulai melaksanakan promosi dan sudah ada wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung
- c. Desa wisata maju merupakan desa wisata yang sudah berkembang dengan adanya kunjungan wisatawan secara kontinu dan dikelola secara profesional dengan terbentuknya forum pengelola, serta mampu melakukan promosi dan pemasaran dengan baik.

2. Manfaat Desa Wisata

Pada dasarnya desa wisata lebih menonjolkan kearifan lokal dan budaya setempat. Di samping itu pengelolaannya juga langsung dari masyarakat setempat dengan memanfaatkan potensi alam, sosial, ekonomi, budaya, sejarah maupun tata ruang yang ada. Hal ini sejalan dengan tujuan dari desa wisata itu sendiri yaitu menggali potensi desa, memperluas

³Totok Mardikanto, *Buku Pedoman Rintisan Model Desa*, 12.

lapangan kerja, pluralisasi, menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap desanya, dan memperkokoh persatuan bangsa.

Dampak positif dari penyelenggaraan desa wisata yaitu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat umumnya dan masyarakat setempat khususnya. Sumarsono memberikan definisi kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan yang sudah di duduki (*employment*) dan masih lowongan (*vacancy*). Lebih jauh dijelaskan bahwa dalam teori kesempatan kerja dikenal istilah elastisitas pemerintah akan tenaga kerja yang diartikan sebagai prosentase perubahan permintaan akan tenaga kerja sehubungan dengan perubahan permintaan akan tenaga kerja yang disebabkan dengan perubahan satu persen pada tingkat upah.⁴

Menurut Departemen Pariwisata disebutkan bahwa salah satu manfaat dari pembangunan pariwisata yaitu terbukanya lapangan kerja, baik lapangan kerja diberbagai usaha yang langsung memenuhi kebutuhan wisatawan maupun yang tidak langsung.⁵ Sektor pariwisata merupakan sektor padat karya karena kegiatannya lebih banyak pelayanan jasa yang membutuhkan tenaga manusia seperti penjaga wahana, penjaga tiket, tukang parkir, seniman, dan lain sebagainya. Dengan adanya pengembangan desa wisata tersebut diharapkan mampu memiliki manfaat sebagai berikut:⁶

⁴Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan* (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2003), 4.

⁵Ibid, 4.

⁶Sastrayuda, Gumelar S. 2010. *Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata*. http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/LAINNYA/GUMELAR_S/HAND_OUT_MATKUL_KONSE

a. Pemberdayaan ekonomi rakyat

Desa wisata perlu dukungan melalui kelancaran dan efektifitas pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Koperasi (UMKK) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) agar masyarakat desa mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk itu perlu adanya pengembangan usaha ekonomi dan mata pencaharian berkelanjutan yang dapat ditempuh dengan cara: pertama, usaha ekonomi rakyat yang memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal dan lestari, kedua, dikembangkan badan usaha milik rakyat yang dapat berdampingan, kemitraan dengan koperasi, ketiga, pengembangan klaster-klaster usaha ekonomi rakyat yang menampilkan produk-produk unggulan bernilai tambah tinggi sebagai sentra-sentra kemandirian ekonomi rakyat.

Dukungan bagi kelancaran dan efektifitas pemberdayaan ekonomi rakyat tersebut dapat dikembangkan secara partisipatif sesuai dengan prioritas masyarakat, seperti prasarana fisik yang memperlancar transportasi dan komunikasi, pelayananan dasar, perluasan ruang publik pada tingkatan masyarakat yang mendukung berbagai lapisan masyarakat, pengembangan tenaga kerja dan lingkungan kerja bagi tenaga kerja usia muda.

b. Pemberdayaan sosial budaya

Pendekatan integratif dalam menata kehidupan sosial dapat dikaitkan melalui kearifan lokal yang terdiri dari pemerintah daerah, sebagai reguler dan fasilitator melakukan identifikasi dan kegiatan atas bentuk, mekanisme dalam pemecahan masalah kependudukan, perbaikan dalam pelayanan masyarakat. Unsur-unsur tersebut perlu menjadi pertimbangan utama dalam mengkaji kawasan desa wisata, mengingat pengembangan kepariwisataan secara umum tidak terlepas kaitannya dengan pariwisata sebagai suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa dampak terhadap masyarakat setempat.

c. Pemberdayaan lingkungan desa wisata

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya menyangkut tiga dimensi penting yaitu, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Dimensi ekonomi antara lain berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memerangi kemiskinan, serta merubah pola produksi dan konsumsi ke arah yang seimbang, sedangkan dimensi sosial bersangkutan dengan upaya pemecahan masalah kependudukan perbaikan pelayanan masyarakat, peningkatan pendidikan dan lain-lain.

3. Pengelolaan Desa Wisata

Kata pengelolaan berasal dari kata kerja mengelola dan merupakan terjemahan dari bahasa Italia *meneguari* yang artinya menangani alat-alat,

berasal dari bahasa latin *manus* yang artinya tangan. Dalam bahasa Perancis terdapat kata *mesnagement* yang kemudian menjadi *management*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengendalikan, mengurus dan menyelenggarakan.⁷

Untuk mengembangkan sebuah desa wisata maka diperlukan pengelolaan yang benar. Masyarakat harus dilibatkan dalam memajukan desa wisata yang sudah dikonsepsi sedemikian rupa. Konsep desa wisata mengajak masyarakat untuk berinovasi dan berkreasi, karena pengelolanya adalah masyarakat desa.⁸ Jadi, akan benar-benar memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, berkeadilan dan kesetaraan. Adapun metode dalam pengelolaannya yaitu:

a. Pengonsultasian dengan semua pemangku kepentingan

Menurut *World Tourism Organization* (WTO), pengelolaan wisata dalam hal ini dapat dilakukan dengan beragam cara, seperti melalui pertemuan formal dan terstruktur dengan pelaku industri pariwisata, dewan pariwisata, konsultasi publik, dan subjek tertentu, peninjauan dan survei, konsultasi kebijakan dengan beragam kelompok dan melalui interaksi antara departemen pemerintah terkait dengan berbagai pihak sesuai subjek yang ditentukan.⁹

⁷Ahsana Mustika Ati, *Pengelolaan Wisata Religi Studi Kasus Makam Sultan Hadiwijaya Untuk Pengembangan Dakwa*, Skripsi Diterbitkan.Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011.

⁸Made Antara, *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal* (Bali:Konsorsium Riset Pariwisata Universitas Udayana, 2015), 29.

⁹Pitana dan Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), 89.

b. Mengidentifikasi isu

Isu pariwisata akan semakin beragam seiring dengan meningkatnya skala kegiatan yang dilakukan. Isu-isu yang mungkin muncul dalam skala kegiatan pariwisata, misalnya penyebaran dan ketimpangan pendapatan antar wilayah, akomodasi dan abtraksi, investasi, termasuk akses modal dan investasi asing.

c. Penyusunan kebijakan

Kebijakan ini yang disusun mungkin akan berdampak langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata. Kebijakan ini akan menjadi tuntunan bagi pelaku pariwisata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan pariwisata.

d. Pembentukan dan pendanaan agen dengan tujuan khusus

Agen ini bertujuan menghasilkan rencana strategis sebagai panduan dalam pemasaran dan pengembangan fisik di daerah tujuan wisata. Agen ini juga bertugas melakukan riset pasar, pemasaran daerah tujuan wisata dan mendorong fasilitas perusahaan pariwisata.

e. Penyediaan fasilitas dan operasi

Hal ini terutama berkaitan dengan situasi dimana pelaku usaha tidak mampu menyediakan fasilitas secara mandiri. Pemerintah berperan dalam memberikan modal usaha, pemberian subsidi kepada fasilitas dan pelayanan yang vital tetapi tidak mampu membiayai dirinya

sendiri tetapi jangka panjang menjadi penentu keberhasilan pembangunan pariwisata.¹⁰

B. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Dalam berbagai literatur ekonomi konvensional dengan mudah dapat dijumpai tujuan dari manusia dalam memenuhi kebutuhannya atas barang dan jasa adalah untuk mencapai kesejahteraan.¹¹ Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya pencapaian pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.¹²

Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya konsumsi seiring meningkatnya pendapatan.¹³ Kesejahteraan dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Taraf kehidupan yang

¹⁰Ibid, 89.

¹¹Ahmad Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011),38.

¹²“Teori Kesejahteraan”,<http://siboykasaci.wordpress.com>, Diakses Tanggal 18 April 2019.

¹³Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguat LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 1.

lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental, tetapi juga spiritual.¹⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 2 berbunyi: Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁵

Kesejahteraan mempunyai lima fungsi pokok, yaitu:

- a. Perbaikan secara progresif dari pada kondisi-kondisi kehidupan orang.
- b. Pengembangan sumber daya manusia
- c. Berorientasi orang terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri.
- d. Pergerakan dan penciptaan sumber-sumber komunitas untuk tujuan pembangunan.
- e. Penyediaan struktur-struktur institusional untuk berfungsinya pelayanan-pelayanan yang terorganisir lainnya.¹⁶

Jadi kesejahteraan masyarakat yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang diperlukan dalam kehidupan setiap masyarakat. Kondisi yang berkecukupan, makmur, sehat tidak merasa dalam keadaan yang kurang sehingga dapat menjalankan kehidupan dengan rasa aman.

¹⁴Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 44.

¹⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 2

¹⁶Tim Dosen LKS UMM, *Beberapa Pikiran Tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Malang: UMM Press, 2007), 166..

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dalam artian luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan spiritual.¹⁷ Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan diukur dari segi uang. Dalam masyarakat Indonesia, kondisi sejahtera itu diartikan hidup aman dan bahagia karena semua kebutuhan dasar dapat terpenuhi, seperti makanan yang cukup, gizi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, pendapatan yang layak dan perlindungan.

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

- a. Rasa aman (*security*)
- b. Kesejahteraan (*welfare*)
- c. Kebebasan (*freedom*)
- d. Jati Diri (*identity*)

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

- a. Tingkat pendapatan keluarga
- b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non pangan.

¹⁷Isbandi Rukminto, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 44.

- c. Tingkat pendidikan keluarga.
- d. Tingkat kesehatan keluarga.
- e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.¹⁸
Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:¹⁹
 - a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
 - b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
 - c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
 - d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Bagi Indonesia masalah kesejahteraan ini juga menjadi perhatian utama, tidak hanya menyangkut kualitas dan kuantitasnya, tetapi juga penyebarannya yang belum merata. Hal ini juga tercermin dalam beberapa asas pembangunan nasional, dua di antaranya adalah asas manfaat dan asas adil dan merata yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Asas manfaat, ialah bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan pribadi warga negara.

Asas adil dan merata, ialah bahwa hasil-hasil material dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh

¹⁸Dokumen Biro Pusat Statistik tahun 2000, Digilib.uinsby.ac.id, diakses pada tanggal 4 Mei 2019.

¹⁹Bintarto, *Interaksi Desa- Kota Dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 94.

seluruh bangsa dan bahwa tiap-tiap warga negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan dan sesuai dengan nilai darma baktinya yang diberikannya kepada bangsa dan negara. (GBHN, Ketetapan MPR No. IV / MPR / 1978). Oleh karena itu, dalam rangka mempelajari pendekatan kesejahteraan ini perlu diperhatikan dan didalami kebutuhan dan keinginan manusia. Untuk mempelajari ini memang tidak mudah karena selain banyaknya, juga variasi dan kadar kepuasannya sangat relatif dan subjektif. Hal ini merupakan masalah atau pertanyaan-pertanyaan bagi para ahli filsafat. Walaupun demikian geografi manusia dengan pendekatan kesejahteraan ini akan mencoba menelusurinya.²⁰

Kesejahteraan merupakan suatu yang harus didapat oleh setiap manusia. Kesejahteraan tidaklah harus dirasakan oleh golongan kaya, akan tetapi kesejahteraan juga harus dirasakan oleh golongan miskin. Oleh karena itu kesejahteraan merupakan sesuatu yang tidak mengenai struktur kemasyarakatan. Siapapun dan dari golongan apapun orang tersebut, harus mendapatkan dan merasakan kesejahteraan.

3. Indikator Kesejahteraan dalam Islam

Kesejahteraan dalam pandangan islam bukan hanya dinilai dengan ukuran materi saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non-material, seperti: terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan

²⁰Ibid, 110.

terwujudnya keharmonisan sosial indikator sejahtera dalam islam merujuk pada firman Allah, yakni:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ
وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۖ

Artinya:

*“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”*²¹

Dari ayat di atas dapat dilihat bahan indikator kesejahteraan dalam Al-Qur’an ada tiga, yaitu:

Pertama, menyembah Tuhan (*ibadatullah*). Indikator ini mengandung makna bahwa proses kesejahteraan masyarakat harus didahului dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik terlebih dahulu dan yang paling utama adalah benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom, dan penolong. Semua aktifitas kehidupan masyarakat terbingkai dalam aktifitas ibadah.²²

Dalam ajaran islam prinsip tauhid merupakan hal yang paling asasi dan esensial, ia tidak boleh terpecah dalam keyakinan setiap muslim yang

²¹QS. Al-Quraisy (106): 3-4.

²²M. Ulinnuha Khusnun, *Islam dan Kesejahteraan: Memotret Indonesia, Dialog 66* (Desember, 2008), 43-44.

mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah, kecuali Allah semata dan Muhammad utusan-Nya.²³

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

Artinya:

*“Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”*²⁴

Kedua, menghilangkan lapar atau pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan indikator ini hidup sejahtera adalah hidup dalam kondisi di mana terpenuhinya semua kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan.²⁵

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Artinya:

*“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*²⁶

²³Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Masyarakat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 42.

²⁴Qs. Al-Ikhlâs (112): 1-4.

²⁵Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Masyarakat*, 46.

²⁶Qs. Al-Jumu'ah(62): 10.

Islam mewajibkan umatnya untuk senantiasa bekerja dan memanfaatkan apa yang telah Allah anugerahkan di langit maupun di bumi, sebagai bekal dalam menjaga eksistensi dirinya dalam menjalankan keberlangsungan hidup.

Ketiga, menghilangkan rasa takut atau jaminan (stabilitas) keamanan. Hidup sejahtera berarti hidup dalam kondisi aman, nyaman, dan tentram. Jika tindak kriminal seperti perampokan, perkosaan, bunuh diri, dan kasus-kasus lainnya masih terjadi dalam sebuah komunitas masyarakat, maka komunitas tersebut belum bisa disebut sejahtera. Dengan demikian, pembentukan pribadi yang saleh dan pembuatan sistem yang mampu menjaga kesalehan setiap orang merupakan hasil integral dari proses mensejahterakan masyarakat.

Inilah tiga indikator kesejahteraan yang digariskan Islam (Al-Qur'an), hidup sejahtera dimulai dari kesejahteraan individu-individu yang mempunyai tauhid yang kuat, tercukupinya semua kebutuhan dasar, dan jika semua itu dapat terpenuhi, maka akan tercipta suasana aman, nyaman dan tentram.²⁷

Kesejahteraan atau kemaslahatan umat manusia dalam pandangan Islam pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan cara menjaga lima misi Islam yaitu memelihara agama (*al-dien*), memelihara jiwa (*nafs*), memelihara akal (*aql*), memelihara keluarga atau keturunan (*nasl*), dan memelihara harta atau kekayaan (*maal*) atau yang biasa disebut dengan

²⁷Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Masyarakat*, 47.

Maqashid Syariah. Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syariah. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, maqashid merupakan bentuk jama' dari maqsud yang berasal dari suku kata qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan dengan berjalan menuju sumber pokok kehidupan.²⁸

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*kesejahteraan*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*), intelek atau akal (*aql*). Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat berdasarkan lima tujuan dasar tersebut.

Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan kebutuhan-kebutuhan dasar yaitu kebutuhan terhadap makanan, pakaian, dan perumahan. Namun demikian, Al-Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar yang demikian cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan tempat, bahkan dapat mencakup kebutuhan-kebutuhan sosio psikologis. Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima pondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran

²⁸Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 279.

dalam hidup. Kelompok ketiga mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja: meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup.²⁹

Menurut Imam Al-Ghazali aktivitas ekonomi merupakan bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang sudah ditetapkan Allah SWT, apabila hal ini tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan runtuh dan kehidupan umat manusia akan binasa. Al-Ghazali merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan
- b. Mensejahterakan keluarga
- c. Membantu orang lain yang membutuhkan.

Sedangkan Al Syatibi mengemukakan, bahwa kemaslahatan umat manusia dapat terealisasikan apabila lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-maqashid al syariah*) dapat terwujud dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Memelihara agama dalam pandangan Islam adalah memelihara suatu hal yang urgen sehingga memelihara agama dikategorikan ke dalam kebutuhan *dharuriyat* (primer).³⁰ Selain itu, ajaran agama islam menganjurkan agar tidak memanjakan orang lain atau membatasi kreatifitas orang lain, sehingga orang tersebut dapat menumbuh kembangkan kemampuan. Ketika seseorang datang kepada Nabi SAW

²⁹Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 283-284.

³⁰Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 174.

mengadukan kemiskinannya, Nabi SAW tidak memberinya uang, tetapi memberikan kapak agar dapat digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan kayu.

Dengan demikian, ajaran Islam tentang kesejahteraan sosial ini termasuk di dalamnya ajaran yang mendorong orang untuk kreatif dan bersikap mandiri, tidak hanya bergantung pada orang lain. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan memelihara *Maqashid Syariah* adalah sebagai berikut:³¹

a. Memelihara kemaslahatan agama

Supaya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang diberikan Allah, baik dalam wujud penegakan dasar-dasar pokok keagamaan, seperti yang berhubungan erat dengan keimanan yaitu, shalat, zakat, dan puasa ramadhan.

b. Memelihara kemaslahatan jiwa

Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan dan keselamatan diri manusia. Dalam hal ini manusia harus melakukan banyak hal, seperti memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan semua yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup.

c. Memelihara akal

Akal amat menentukan baik buruknya perilaku hidup dan peradaban. Oleh karena itu, syari'ah Islam mengajarkan untuk memelihara dan mengembangkan kejernihan pemikiran manusia serta amannya produk

³¹Eus Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Pusaka Asatruss, 2007), 123.

pemikiran manusia. Manusia dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar untuk kemakmuran hidup.

d. Memelihara keturunan

Syariat yang mengatur pemeliharaan keturunan yang baik dalam membangun keluarga dan masyarakat, maka Al-Qur'an mengatur hukum keluarga yang mencakup perintah membangun keluarga di atas pernikahan yang sah. Dengan perlindungan keturunan maka terpenuhinya kebutuhan diri pribadi, keluarga, hubungan kekeluargaan, dan keturunan yang menjamin penggantian generasi.

e. Memelihara harta

Syari'at menghendaki kehidupan yang layak dan sejahtera. Untuk itu, Islam mengajarkan tata cara memperoleh harta, seperti hukum bolehnya jual beli disertai persyaratan keridhaan kedua belah pihak dan tidak ada praktik riba dan monopoli. Dengan menjaga harta maka terpenuhinya kebutuhan akan air bersih, air suci, dan mensucikan, udara yang segar, bahan bakar, listrik, sarana komunikasi dan informasi, sandang, pangan, dan papan.³²

4. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memang membutuhkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Upaya penciptaan kesejahteraan di masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Kemiskinan

³²Ibid, 123.

memang tidak dapat dihilangkan oleh pemerintah. *Social security* (pemberian keamanan pada kehidupan sosial) dimaksudkan untuk mengurangi jumlah kemiskinan bukan untuk menghilangkan kemiskinan melalui progam-progamnya. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu persyaratan. Ada dua pokok syarat dalam suatu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, yaitu:

a. Perbaikan dalam produksi

Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (*utility*) baik di masa kini maupun dimasa mendatang. Dengan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan produksi tidak terlepas dari keseharian manusia. Produksi, distribusi, dan konsumsi sesungguhnya merupakan satu rangkaian kegiatan ekonomi yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya saling mempengaruhi, namun diakui atau tidak produksi merupakan titik pangkal dari kegiatan tersebut.³³ Oleh karena itu perbaikan dalam produksi merupakan syarat peningkatan adanya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Adapun perbaikan dalam produksi yang dapat dilakukan antara lain:³⁴

- 1) Meningkatnya hasil produksi sehingga hasil dari setiap keluarga yang lebih besar akan diperoleh dengan daya upaya yang kecil.

³³Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), 85-86.

³⁴Muhammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 35.

- 2) Perbaikan dalam organisasi produksi menghindari pengangguran dan sebab-sebab lain sehingga dapat mengurangi pemborosan sumber daya ekonomi sekecil-kecilnya.
- 3) Perbaikan dalam susunan atau pola produksi sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat.

b. Perbaikan dalam distribusi

Distribusi menjadi suatu aktivitas yang penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan kegiatan ekonomi. Ketidakbenaran dalam distribusi menjadikan alokasi harta menjadi tidak seimbang. Distribusi merupakan alat untuk menjamin adanya keseimbangan penguasaan aset dan kekayaan, agar kesenjangan yang muncul akibat perbedaan kemampuan antar manusia dapat diminimalisir. Kesenjangan akan menimbulkan masalah ketika mekanisme distribusi tidak berjalan dengan lancar.³⁵ Perbaikan dalam distribusi perlu dilakukan untuk mengurangi adanya kesenjangan, antara lain:

- 1) Pengurangan perbedaan dalam pendapatan individu dan keluarga yang berlainan yang biasa berada pada komunitas yang beradab.
- 2) Pengurangan fluktuasi antara periode waktu yang berbeda-beda dalam pendapatan individu dan keluarga tertentu, terutama di kalangan masyarakat yang lebih miskin.³⁶

³⁵Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Bogor: IPB Press, 2015), 29.

³⁶Muhammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, 35.